



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk mendukung tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik serta perlindungan terhadap keamanan arsip, perlu dilakukan klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
5. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
6. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
7. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

8. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
9. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang selanjutnya disingkat SKKAAD adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi seluruh Unit Pengolah dalam pengelolaan Arsip Dinamis untuk menyediakan informasi Kementerian yang dapat diakses baik Pengguna Internal maupun Pengguna Eksternal.

#### Pasal 3

SKKAAD bertujuan untuk:

- a. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
- b. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai hak akses sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan SKKAAD meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan Arsip Dinamis;
- b. hak akses Arsip Dinamis; dan
- c. pengamanan penyimpanan dan pengamanan penyampaian Arsip Dinamis.

#### Pasal 5

- (1) Sistem klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Biasa/Terbuka;
  - b. Terbatas; dan
  - c. Rahasia.

- (2) Penentuan klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul dalam hal informasi yang terdapat dalam Arsip Dinamis disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan kepentingan yang tidak sah.
- (3) Penentuan klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Unit Pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pengaturan hak akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan sistem klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. penentu kebijakan meliputi:
    1. Menteri;
    2. pejabat tinggi madya;
    3. pejabat tinggi pratama;
    4. staf khusus menteri;
  - b. pelaksana kebijakan meliputi:
    1. pejabat administrator;
    2. pejabat pengawas;
    3. pejabat fungsional; dan
    4. pejabat pelaksana.
  - c. pengawas internal.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berwenang mengakses seluruh Arsip.
- (3) Pejabat tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, pejabat tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dan staf khusus menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4:
  - a. berwenang mengakses Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah di bawah kewenangannya;
  - b. diberikan akses atas Arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dengan izin pimpinan tingkat tertinggi;
  - c. diberikan akses atas Arsip yang terdapat pada satu level dengan unit di luar unit kerjanya/ di luar kewenangannya setelah mendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
- (4) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, dan pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 berwenang mengakses:
  - a. seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. Arsip dengan tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka; dan
  - c. Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah diluar unit kerjanya setelah mendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
- (5) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Klasifikasi keamanan dan klasifikasi akses Arsip Dinamis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. pengawas eksternal;
  - b. aparat penegak hukum; dan
  - c. publik.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengakses Arsip di Kementerian yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- (4) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses Arsip di Kementerian yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pengamanan penyimpanan dan pengamanan penyampaian Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikoordinasikan oleh Unit Kearsipan.
- (2) Pelaksanaan Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pejabat fungsional arsiparis di Unit Pengolah.
- (3) Dalam hal pada Unit Pengolah belum tersedia pejabat fungsional arsiparis, Pengamanan Arsip Dinamis dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola Arsip oleh Unit Pengolah.

#### Pasal 11

Pengamanan penyimpanan dan pengamanan penyampaian Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri.

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor Menengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 632), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KEMENKOP-UKM

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2022

MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1228

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

**Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn.**  
NIP 19721204 200112 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
 KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES  
 ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tabel Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
<b>I</b>	<b>FASILITATIF</b>					
<b>A</b>	<b>HM</b>	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>				
1	HM.00	Pemberitaan/Publikasi Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: Kertas/foto/video/rekaman suara/multi media a. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah b. Eselon I c. Pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI
2	HM.01	Dengar Pendapat/Hearing Dokumen persidangan dan Rapat (Bahan Sidkab, Rapat Terbatas, Rakor Tingkat Badan, RDP DPR/DPD RI, Pidato Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) a. Bahan Sidang Kabinet b. RDP DPR/DPD RI c. Rakor Tingkat badan termasuk hasil rumusan dan transkrip	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Bahan Rapat Terbatas Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah				
		e. Pidato Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah f. Bahan Pidato kenegaraan Presiden bidang Koperasi dan UKM				
3	HM.02	Hubungan Media dan Antar Lembaga a. Hubungan antar lembaga pemerintah b. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM c. Hubungan dengan perusahaan d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah e. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang pendidikan sistem ganda (PSG)/praktek kerja lapangan (PKL) f. Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas) g. Hubungan dengan media massa: a) Siaran pers/konferensi pers/press release/wawancara b) Kunjungan wartawan/peliputan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI
4	HM.03	Dokumentasi dan Penerbitan Pengumpulan, pengolahan dan penyajian Informasi kelembagaan: a. Kliping koran b. Brosur/leaflet/poster/plakat c. Pengumuman/pemberitahuan d. Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal e. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik f. Pameran/sayembara/lomba/festival/pembuatan Spanduk dan Iklan g. Layanan Diorama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI
<b>B</b>	<b>HK</b>	<b>HUKUM</b>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	HK.00	Program Legislasi a. Bahan/materi program legislasi nasional dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah b. Program legislasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c. Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan d. Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan e. Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
2	HK.01	Produk Hukum				
	HK.01.00	a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	HK.01.01	b. Keputusan / Ketetapan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
3	HK.02	<p>Kerjasama Dalam Negeri</p> <p>a. Kerjasama Dalam Negeri</p> <p>a) Rancangan/draf sampai dengan rancangan final, telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, naskah asli yang ditandatangani, risalah pembuatan NK, MoU, kontrak, perjanjian.</p> <p>b) Administrasi penandatanganan NK, MoU, kontrak, PKS.</p> <p>c) MoU/Nota Kesepahaman, Kontrak, Perjanjian Kerjasama (PKS).</p> <p>b. Kerjasama Luar Negeri</p> <p>a) Rancangan/draf samapi dengan rancangan Final telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum naskah asli yang ditandatangani, risalah pembuatan NK, MoU, kontrak, perjanjian.</p> <p>b) MoU/Nota Kesepahaman, Kontrak, Perjanjian Kerjasama (PKS).</p>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak Yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
			Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
4	HK.03	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		a. Bantuan Hukum Kasus Perdata a) Gugatan b) Surat Pemanggilan c) Surat Kuasa d) Putusan Sidang e) Banding f) Tindak lanjut hasil sidang	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
	HK.03.01	b. Bantuan Hukum Kasus Pidana a) Gugatan b) Surat Pemanggilan c) Surat Kuasa d) Putusan Sidang e) Banding f) Tindak lanjut hasil sidang	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
	HK.03.02	c. Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara a) Gugatan b) Surat Pemanggilan c) Surat Kuasa d) Putusan Sidang e) Banding f) Tindak lanjut hasil sidang	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
5	HK.04	Telaan Hukum a. Telaah Hukum Internal a) Telaahan b) Surat Penyampaian Telaahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Biro Hukum dan Kerja Sama

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Telaah Hukum Eksternal a) Telaahan b) Surat Penyampaian Telaahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
6	HK.05	Sosialisasi Hukum a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ pembinaan hukum. b. Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan/ pembinaan hukum	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
7	HK.06	Dokumentasi Hukum a. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Keputusan presiden dan Peraturan-peraturan yang dijadikan referensi b. Himpunan Produk Hukum	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
8	HK.07	Hak Atas Kekayaan Intelektual a. Berkas pengajuan paten b. Berkas pengajuan hak cipta c. Administrasi pemeliharaan paten	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Hukum dan Kerja Sama

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					kinerja Kementerian KUKM	
9	HK.08	<p>Kasus Hukum</p> <p>a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran :</p> <p>a) Proses verbal mulai dari penyelidikan, Penyidikan sampai dengan vonis</p> <p>b) Berkas pembelaan dan bantuan hukum</p> <p>c) Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata :</p> <p>a) Proses verbal mulai dari penyelidikan, Penyidikan sampai dengan vonis</p> <p>b) Berkas pembelaan dan bantuan hukum</p> <p>c) Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/sengketa tata usaha negara :</p> <p>a) Proses verbal mulai dari penyelidikan, Penyidikan sampai dengan vonis</p> <p>b) Berkas pembelaan dan bantuan hukum</p> <p>c) Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>Arbitrase Berkas tentang kasus/sengketa arbitrase :</p>	<p>Rahasia</p> <p>Rahasia</p> <p>Rahasia</p> <p>Rahasia</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Pimpinan</p>	<p>Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM</p> <p>Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM</p> <p>Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM</p> <p>Dapat mengakibatkan</p>	<p>Biro Hukum dan Kerja Sama</p> <p>Biro Hukum dan Kerja Sama</p> <p>Biro Hukum dan Kerja Sama</p> <p>Biro Hukum dan</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Proses verbal mulai dari penyelidikan, Penyidikan sampai dengan vonis</li> <li>b) Berkas pembelaan dan bantuan hukum</li> <li>c) Telaah hukum dan opini hukum</li> </ul>		Tinggi Pratama	terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM	Kerja Sama
<b>C</b>	<b>IP</b>	<b>INFORMASI PUBLIK</b>				
1	IP.00	Pelayanan Informasi a. Layanan Informasi Publik b. Layanan Website	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI
2	IP.01	Pelayanan Pengaduan Internal	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
3	IP.02	Kepustakaan a. Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit</li> <li>b) Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka</li> </ul> b. Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Buku induk koleksi</li> <li>b) Daftar buku terseleksi</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Daftar buku dalam pemesanan</li> <li>d) Daftar buku dalam permintaan</li> <li>e) Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah</li> <li>f) Daftar pengiriman bahan pustaka surplus</li> <li>g) Lembar kerja pengolahan BP (buram, pengkatalogan)</li> <li>h) Jajaran kartu utama/ <i>Shelt list (master list)</i></li> <li>i) Daftar tambahan buku (<i>assesion list</i>)</li> <li>j) Daftar/jajaran kendali (subyek dan pengarang)</li> <li>c. Layanan jasa perpustakaan dan informasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka</li> <li>b) Pertanyaan rujukan dan jawaban</li> </ul> </li> <li>d. Preservasi bahan pustaka               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Survei kondisi bahan pustaka</li> <li>b) Reprografi bahan pustaka</li> </ul> </li> </ul>				
4	IP.03	Aspirasi Masyarakat	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI
<b>D.</b>	<b>KP</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				
1	KP.00	Penyusunan dan Penetapan Pegawai				
	KP.00.00	a. Perencanaan Formasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kebijakan manajemen kepegawaian</li> <li>b) Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat kinerja	Biro MKOS



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c) persediaan pegawai / <i>Bezzeting</i> d) Pertimbangan formasi e) Rencana penempatan pegawai f) Standarisasi jabatan  b. Usulan Formasi a) Berkas usulan dari unit kerja b) Berkas usulan permintaan persetujuan formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN  c. Persetujuan/Penetapan Formasi a) Berkas persetujuan Menpan dan RB b) Berkas penetapan formasi PNS  d. Penetapan Formasi Khusus a) Berkas penetapan formasi khusus	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	mengganggu Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS  Biro MKOS  Biro MKOS
2	KP.01	Pengumuman dan Seleksi Pengadaan ASN				
	KP.01.00	a. Pengumuman dan Seleksi Pengadaan ASN a) Berkas proses penerimaan pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b) Penetapan pengumuman kelulusan c) Berkas lamaran yang diterima d) Berkas lamaran yang tidak diterima e) Open bidding/seleksi terbuka jabatan f) Usul dan kelengkapan penetapan NIP			dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	
	KP.01.01	b. Penempatan Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.01.02	c. Pengangkatan ASN a) Nota usul pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun b) SK CPNS dan PNS kolektif	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.01.03	d. Penerimaan CASN	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.01.04	e. Pembekalan/Orientasi CASN	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
3	KP.02	Pangkat/Jabatan				
	KP.02.00	a. Ujian penyesuaian ijazah a) Edaran/pengumuman b) Permohonan/usulan dari unit kerja c) Pengumuman/penetapan kelulusan d) Sertifikat/surat tanda lulus	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.01	b. Ujian Dinas Pegawai a) Edaran/pengumuman b) Permohonan/usulan dari unit kerja c) Pengumuman/penetapan kelulusan d) Sertifikat/surat tanda lulus	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.02	c. Ujian Kompetensi a) Berkas penilaian kompetensi b) Hasil penilaian kompetensi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS DOKUMEN/ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
	KP.02.03	d. Kenaikan Pangkat/golongan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.04	e. Kelas Jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.05	f. Pengangkatan Jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.06	g. Pemberhentian Jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.02.07	h. Usulan Jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.08	i. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.09	j. Peninjauan Masa Kerja Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
4	KP.03	Pengembangan Pegawai				
	KP.03.00	a. Perencanaan dan pengembangan karir a) Berkas perencanaan dan pengembangan karir pegawai b) Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Kementerian KUKM	
	KP.03.01	b. a) Tugas Belajar dan Ijin Belajar Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi b) Laporan hasil tes masuk perguruan tinggi yang dituju c) Ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas, belajar, surat perintah/tugas belajar/SK/ surat ijin, surat-surat sponsor Laporan perkembangan studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.03.02	c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan/ Keahlian a) Berkas penyusunan, pembinaan, pengembangan pola keterampilan/keahlian pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.03.03	d. Sertifikasi Profesi a) Portofolio b) Sertifikat/surat tanda lulus	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
5	KP.04	Mutasi Pegawai				

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS DOKUMEN/ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
	KP.04.00	a. Promosi Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.04.01	b. Rotasi Kerja Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.04.02	c. Alih Tugas Pegawai; Alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi ke Balai/UPT, dan mutasi antar unit kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
6	KP.05	Penilaian Kinerja				
	KP.05.00	a. Sasaran Kinerja Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.05.01	b. Elektronik Kinerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
7	KP.06	Penggajian dan Tunjangan				
	KP.06.00	a. Kenaikan gaji berkala pegawai a) Usulan kenaikan gaji berkala b) Surat keputusan kenaikan gaji berkala	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.06.01	b. Tunjangan Kinerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.06.02	c. Kesehatan a) Surat permohonan pendaftaran penawaran asuransi kesehatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Biro MKOS



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.06.03	d. Perumahan a) Surat permohonan pendaftaran penawaran perumahan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Kementerian KUKM Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.06.04	e. Rekreasi/Kesenian/Olahraga	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.06.05	f. Bantuan Sosial Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
8	KP.07 KP.07.00	Penghargaan a. Penerima Penghargaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					mengganggu kinerja Kementerian KUKM	
	KP.07.01	b. Tanda Jasa a) Surat pengajuan tanda jasa b) SK c) Sertifikat/piagam	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
9	KP.08	Sistem Informasi Manajemen PNS				
		a. Data/Keterangan Pegawai a) Surat Perintah Tugas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
		b) Berkas kepegawaian dan daftar urut kepangkatan (DUK)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c) Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai  d) LP2P/SPT tahunan/NPWP  e) Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan	Rahasia  Biasa/Terbuka  Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS  Biro MKOS  Biro MKOS
	KP.08.01	b. Kartu-Kartu Kepegawaian (Dokumen Identitas Pegawai) a) Usulan penetapan kartu pegawai b) Usulan penetapan karis/karsu c) Usulan penetapan kartu taspen d) Usulan penetapan kartu jaminan kesehatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
	KP.08.02	c. Tenaga Kontrak	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.08.03	d. Berkas Perseorangan a) Lamaran Yang Diterima b) Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d) SK Pengangkatan CPNS e) Hasil Pengujian Kesehatan f) SK Pengangkatan CPNS g) SK Peninjauan Masa Kerja h) SK Kenaikan Pangkat i) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ j) Menduduki Jabatan dan Surat k) SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan l) Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan m) SK Perpindahan Wilayah Kerja n) SK Perpindahan Antar Instansi o) SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) p) Berita Acara Pemeriksaan	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>q) SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS</li> <li>r) SK Perbantuan/Dipekerjakan/Penugasan di luar Instansi Induk</li> <li>t) SK Penarikan Ungu Tunggu</li> <li>u) SK Pemberian Uang Tunggu</li> <li>v) SK Pemberhentian sebagai PNS</li> <li>w) SK Pemberhentian/Pembebasan Sementara</li> <li>x) SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara</li> <li>y) SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat</li> <li>z) diangkat Sebagai Pejabata Negara</li> <li>aa) SK Pengalihan PNS</li> <li>bb) Surat Keterangan Pernyataan Hilang</li> <li>cc) Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang</li> <li>dd) SK Penggantian Nama</li> <li>ee) Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran</li> <li>ff) Akta Nikah/Cerai</li> <li>gg) Akta Kelahiran</li> <li>hh) Isian Formulir PUPNS</li> <li>ii) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan</li> <li>jj) Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol</li> <li>kk) Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang</li> <li>ll) Surat Keterangan Mutasi Keluarga</li> <li>mm) Surat Keterangan Feningkatan Pendidikan</li> <li>nn) Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional</li> <li>oo)</li> <li>pp)</li> <li>qq)</li> </ul>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		rr) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus ss) Surat Pemeberitahuan Kenaikan Gaji Berkala tt) Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri uu) Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri vv) Surat Persetujuan dan SK Perubahan data dasar/status kedudukan hukum ww) Ijazah/Sertifikat yy) SK Penempatan/Penarikan Pegawai zz) SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan di luar Instansi Induk bbb) Surat Pertimbangan Status PNS ccc) SK Pengaktifan kembali sebagai PNS ddd) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah eee) SK Penghargaan dan Tanda Jasa fff) SK Pensiun ggg) SK Pensiun hhh) SK Pensiun				
10	KP.09	Disiplin				
	KP.09.00	a. Disiplin Pegawai a) Kode etik pegawai  b) Daftar hadir	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
			Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c) Rekapitulasi daftar hadir	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		d) Hukuman disiplin	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.09.01	b. Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.09.02	c. Perselisihan/Sengketa Pegawai	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pimpinan Tinggi Pratama	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	
	KP.09.03	d. Presensi Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.09.04	e. Cuti a) Cuti Tahunan b) Cuti Besar c) Cuti Sakit d) Cuti Bersalin e) Cuti Karena Alasan Penting f) Cuti di Luar Tanggungan Negara	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
11	KP.10	Pemberhentian dan Jaminan Pensiun				
	KP.10.00	a. Pemberhentian Pegawai Dengan Hormat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Biro MKOS



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
	KP.10.01	b. Pemberhentian Pegawai Tidak Dengan Hormat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.10.02	c. Sementara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.10.03	d. Batas Usia Pensiun a) Usul pemberhentian b) SK	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
12	KP.11	Perlindungan dan Tabungan Hari Tua				
	KP.11.00	a. Taspen	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pratama	pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	
	KP.11.01	b. Akses	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.11.02	c Taperas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
13	KP.12	Organisasi Non Kedinasan				
		a. KORPRI	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		b. Dharma Wanita	Biasa/Terbuka	Pejabat	Tidak memiliki	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Organisasi Lainnya	Biasa/Terbuka	Administrator  Pejabat Administrator	dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
<b>E.</b>	<b>PR</b>	<b>KEPROTOKOLAN</b>				
1	PR.00	Acara Kedinasan Menteri/Pimpinan (pelantikan, peresmian, dan jamuan)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
2	PR.01	Kunjungan a. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri Menteri b. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri pejabat lain/pegawai c. Kunjungan dinas eksternal d. Buku Tamu	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS DOKUMEN/ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
3	PR.02	Apresiasi Antar Lembaga a. Pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar b. Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf dll	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
4	PR.03	Daftar nama/alamat kantor/pejabat	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
5	PR.04	Agenda Kegiatan Pimpinan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
<b>F.</b>	<b>RT</b>	<b>KERUMAHTANGGAN</b>				
1	RT.00	Pengelolaan Fasilitas Kantor a. Permintaan dan penggunaan ruang, gedung dan fasilitas kantor lainnya b. Tata letak dan layout ruang kerja c. Penyediaan konsumsi dan akomodasi d. Penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		meliputi: telepon, TV kabel, dan internet			Kementerian KUKM	
2	RT.01	Ketertiban dan Keamanan				
		<p>a. Pengamanan, penjagaan dan pengawalan Terhadap personil, kantor dan rumah dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Daftar nama satuan pengamanan</li> <li>b) Daftar jaga/daftar piket</li> <li>c) Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian</li> <li>d) Surat izin keluar masuk orang atau barang</li> <li>e) Peningkatan kapasitas ketertiban dan keamanan</li> </ul> <p>b. Laporan ketertiban dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan kehilangan, kerusakan, kecelakaan dan gangguan</li> </ul> <p>c. Pengelolaan parkir</p> <p>d. Pakaian dinas pegawai</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pejabat Administrator</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM</p> <p>Tidak memiliki dampak yang</p>	<p>Biro Umum dan Keuangan</p> <p>Biro Umum dan Keuangan</p> <p>Biro Umum dan Keuangan</p> <p>Biro Umum dan</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e. Tanda pengenal pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Keuangan  Biro Umum dan Keuangan
3	RT.02	Pelayanan				
	RT.02.00	Kesehatan/ Poliklinik a. Rekam medik pegawai  b. Surat keterangan sehat/sakit	Rahasia  Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan  Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Daftar tenaga medis dan non medis  d. Kegiatan layanan kesehatan/poliklinik	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan  Biro Umum dan Keuangan
	RT.02.01	Tempat Penitipan Anak	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	RT.02.02	Layanan Lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
<b>G</b>	<b>TU</b>	<b>KETATAUSAHAAN</b>				
1	TU.00	Rapat/Rapat Kerja/Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Teknis a Administrasi rapat Menteri/Pimpinan b Bahan rapat Menteri/Pimpinan c Risalah/Notulen/Notula Menteri d Risalah/Notulen/Notula Eselon I	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
2	TU.01	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
3	TU.02	Tanda Kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
4	TU.03	Ucapan (Ucapan terima kasih, ucapan selamat, belasungkawa, simpati, pesan/kesan, permohonan maaf, dan rekomendasi)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki	Biro Umum



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	dan Keuangan
<b>H</b>	<b>AR</b>	<b>KEARSIPAN</b>				
1	AR.00	Pembinaan				
		a. Apresiasi/ sosialisasi/ penyuluhan kearsipan/ lokakarya/ <i>workshop</i> b. Bimbingan Teknis c. Persetujuan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria d. (NSPK) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
2	AR.01	Pengelolaan Arsip Dinamis				
		a. Pengelolaan Arsip Aktif b. Pengelolaan Arsip Inaktif c. Pengelolaan Arsip Vital d. Pengelolaan Arsip Terjaga e. Alih Media Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
3	AR.02	Penyusutan Arsip				
		a. Pemindahan Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Pemusnahan Arsip  c. Penyerahan Arsip	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan  Biro Umum dan Keuangan
4	AR.03	Aplikasi Kearsipan				
		a. Aplikasi Bidang Kearsipan (SRIKANDI) b. Arsip Elektronik	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
<b>I</b>	<b>KU</b>	<b>KEUANGAN</b>				

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS DOKUMEN/ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
1	KU.00	Pelaksanaan Anggaran				
	KU.00.00	DIPA/POK a. Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) b. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.00.01	Pengajuan TOR/RAB	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.00.02	Penggajian dan Pembayaran Tunjangan Kinerja a. Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium b. Kartu Gaji c. Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.00.03	Pengeluaran Anggaran	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Biro Umum
		a. Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas b. Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga c. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)		Pimpinan Tinggi Pratama	yang dapat mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) f. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) g. Surat Perintah Membayar (SPM) h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) i. Juklak/mekanisme pengelolaan APBN j. Bahan Nota Keuangan			KUKM	
2	KU.01	Pengelolaan Perbendaharaan				
	KU.01.00	Perbendaharaan a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Kuasa Pengguna Barang/Jasa c. Pejabat Pembuat Komitmen d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji e. Pejabat Penandatanganan SPM f. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran g. Pengelola Barang (termasuk berita acara serah terima jabatan)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.01.01	Verifikasi Anggaran a. Nota Hasil Verifikasi (NHV) b. Jawaban Nota Hasil Verifikasi (JNHV)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.01.02	Pembukuan Anggaran a. Buku Kas Umum (BKU) b. Buku Kas Pembantu (BKP)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran d. Rekening Koran Bank e. Laporan Pertanggungjawaban(LPJ) f. Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK) g. Daftar Rekapitulasi pihak ketiga h. Daftar rekapitulasi PNBP i. Ijin penggunaan kas besi		Pratama	pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	
	KU.01.03	Pajak Surat Setoran Pajak (SSP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.01.04	Penerimaan Non Pajak a. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Buku b. Penerimaan, Buku Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.01.05	Pengembalian Belanja a. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk dokumen-dokumen Pembayarannya: a) Barang pakai habis b) Barang inventaris: 1) Barang Bergerak/Barang Inventaris	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		2) Tanah dan Bangunan c) Jasa d) Software Komputer e) Pengumuman Lelang f) Dokumen Prakualifikasi g) Dokumen Peninjauan Lapangan h) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan i) Berita Acara Pelelangan j) Usulan Calon Pemenang g) Penetapan Pemenang k) Surat Perintah Kerja (SPK)			KUKM	
		b. Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
		c. Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
		d. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KU.01.06	SKKP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	<p>mengganggu kinerja Kementerian KUKM</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM</p>	Biro Umum dan Keuangan
	KU.01.07	Keterangan Penghasilan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	<p>Tidak memiliki dampak yang Dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM</p>	Biro Umum dan Keuangan
3	KU.02	Laporan Keuangan				
	KU.02.00	<p>Dokumen Sumber Akuntansi</p> <p>a. Berita Acara Pemeriksaan Kas</p> <p>b. Kas/ Register Penutupan Kas</p> <p>c. Arsip Data Komputer (ADK)</p> <p>d. Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN</p>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KU.02.01	Berita Acara Rekonsiliasi a. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)  b. Kebijakan Akuntansi  c. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi  d. Laporan Realisasi Semesteran APBN	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Terbatas  Terbatas	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Biro Umum dan Keuangan  Biro Umum dan Keuangan  Biro Umum dan Keuangan  Biro Umum dan Keuangan



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
	KU.02.02	Laporan Keuangan a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca c. Laporan Arus Kas (LAK) d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) e. Laporan Barang Milik Negara (BMN) f. Laporan Realisasi Pendapatan Negara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
4	KU.03	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri				
	KU.03.00	Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri ( <i>Blue Book</i> )	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.01	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai ( <i>Grey book</i> )	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.02	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					tugas dan fungsi Kementerian KUKM	
	KU.03.03	Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.04	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.05	Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya: a. Pengembalian b. Prosedur pembayaran/transfer langsung c. Komitmen khusus/pembukaan L/C d. Akun khusus/dana imrest e. Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri f. Pemberitahuan pencairan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.06	Otorisasi Penarikan Dana ( <i>Payment Advice</i> )	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pimpinan Tinggi Pratama	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	dan Keuangan
KU.03.07		Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya.	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
KU.03.08		Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor ( <i>Replenishment</i> ) meliputi antara lain : Nomor <i>Objection Letter</i> (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statemen of Expenditure (SE)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
KU.03.09		<i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KU.03.10	Laporan / Report a. Progress Report b. Monthly Report c. Quarterly Report d. Final Report/ Completion Report	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.11	Laporan Hutang Negara a. Laporan Pembayaran Hutang Negara b. Laporan Posisi Hutang Negara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.12	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/ Hibah Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
<b>J</b>	<b>OT</b>	<b>ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>				
1	OT.00	Struktur Organisasi				
	OT.00.00	a. Pembentukan, perubahan, dan penyempurnaan organisasi Pembentukan, penataan di unit utama dan UPT	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					mengganggu kinerja Kementerian KUKM	
	OT.00.01	b. Evaluasi Organisasi Pengukuran dan penilaian kinerja organisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	OT.00.02	c. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		d. Rincian Tugas Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
2	OT.01	Analisis Jabatan				

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS DOKUMEN/ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
	OT.01.00	a. Analisis Jabatan Struktural	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	OT.01.01	b. Analisis Jabatan Fungsional Tertentu	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	OT.01.02	c. Analisis Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
3	OT.02	Evaluasi Jabatan				
		Evaluasi jabatan struktural, fungsional tertentu dan pelaksana/fungsional umum di lingkungan Kementerian	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
4	OT.03	Analisis Beban Kerja a. Nama jabatan b. Uraian jabatan c. Perhitungan beban kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
5	OT.04	Uraian Jabatan dan Tata Kerja Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
6	OT.05	Tata Laksana				
	OT.05.00	a. Penyusunan dan penyelarasan Tata Cara/Peta Proses Bisnis  Penyusunan dan penyelarasan proses bisnis mulai dari perencanaan hingga penetapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	OT.05.01	b. Evaluasi Tata Cara/Peta Proses Bisnis	Biasa/Terbuka	Pejabat	Tidak memiliki	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Peta proses bisnis		Administrator	dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	
	OT.05.02	c. Penyusunan dan Penyelarasan Sistem dan Prosedur Kerja Penyusunan dan penyelarasan SOP mulai dari perencanaan hingga penetapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	OT.05.03	d. Monitoring dan Evaluasi Sistem dan Prosedur Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
7	OT.06	Reformasi Birokrasi SOP/Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Biro MKOS



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Kementerian KUKM	
<b>K</b>	<b>BJ</b>	<b>PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>				
1	BJ.00	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	BJ.00.00	a. Penyusunan Rencana Kebutuhan a) Daftar rencana kebutuhan BMN (RKBMN) b) Usulan kebutuhan perlengkapan/barang inventaris kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	BJ.00.01	b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa a) Daftar <i>company profile</i> b) Surat rekomendasi/penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa c) Daftar rekanan mampu d) Tata ruang/ <i>layout</i> ruang kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	BJ.00.02	c. Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Persediaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					mengganggu kinerja Kementerian KUKM	
2	BJ.01	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa				
	BJ.01.00	a. Barang Bergerak	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	BJ.01.01	b. Barang Tidak Bergerak	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	BJ.01.02	c. Barang Habis Pakai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	BJ.01.03	d. Jasa Konsultasi	Biasa/Terbuka	Pejabat	Tidak memiliki	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Administrator	dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	dan Keuangan
	BJ.01.04	e. Jasa Lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
<b>L</b>	<b>PW</b>	<b>PENGAWASAN</b>				
1	PW.00	Audit				
		a. Pelaksanaan Audit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
		b. Laporan Hasil Audit (LHA)	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
2	PW.01	Reviu a. Pelaksanaan Reviu b. Laporan Hasil Reviu (LHR)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
3	PW.02	Evaluasi a. Pelaksanaan Evaluasi b. Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
4	PW.03	Penguatan Pengawasan				
	PW.03.00	a. Gratifikasi a) Renja Gratifikasi b) Sosialisasi c) Rencana Aksi d) Monitoring e) Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.01	b. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		a) Sosialisasi b) Pendampingan c) Penjaminan Kualitas d) Pemantauan rencana Aksi		Pimpinan Tinggi Pratama	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	
PW.03.02	c.	<i>Whistle Blowing System (WBS)</i> a) Renja Gratifikasi b) Sosialisasi c) Rencana Aksi d) Monitoring Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
PW.03.03	d.	Benturan Kepentingan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
PW.03.04	e.	Zona Integritas a) Reviu LKE ZI WBK b) SK Tim c) SK Unit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.03.05	f. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) a) SK Tim b) Pengisian kertas kerja c) Penilaian Mandiri	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.06	<i>Stock Opname</i> Barang Milik Negara a. Pelaksanaan b. Berita Acara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.07	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) a. Surat Edaran Inspektur b. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.08	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) a. Surat Edaran LHKASN b. Monitoring Kepatuhan Pelaporan c. Verifikasi Laporan LHKASN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.03.09	Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.10	Pengarusutamaan Gender Reviu General <i>Analisis Pathway</i> dan <i>Gender</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.11	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Reviu P3DN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
5	PW.04	Konsultasi Pengawasan				
	PW.04.00	Pengadaan barang dan jasa Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
	PW.04.01	Akuntabilitas Kinerja Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.04.02	Akuntabilitas Keuangan Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.04.03	Badan Layanan Umum (BLU)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
6	PW.05	Pemantuan Tindak Lanjut				
	PW.05.00	Pemantuan tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Inspektorat



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.05.01	Pemantuan tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal Surat Edaran Terkait tindak lanjut	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.05.02	Pemantuan Pelaksanaan Kegiatan/Program a. Monitoring Penyerapan anggaran b. Monitoring Pelaksanaan RB	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
7	PW.06	Kegiatan Pengawasan Lainnya				
	PW.06.00	Administrasi Pengawasan Administrasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.06.01	Perencanaan Pengawasan a. PKPT b. Renja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.06.02	Pedoman/Kebijakan Pengawasan a. Pembentukan Tim b. Draft Pedoman c. Pedoman Final d. Sosialisasi	Terbatas	Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
<b>M</b>	<b>BN</b>	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA</b>				
1	BN.00	Penggunaan a. Surat usulan penggunaan/permohonan penggunaan barang b. Surat persetujuan/SK c. Formulir peminjaman d. Berita Acara Serah Terima e. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
2	BN.01	Pemanfaatan a. Surat usulan penggunaan/permohonan Penggunaan barang b. Berita Acara Serah Terima c. SK	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS DOKUMEN/ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
3	BN.02	Penyimpanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
4	BN.03	Pengamanan a. Laporan pengamanan/penjagaan barang milik negara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
5	BN.04	Distribusi/Penyaluran a. Daftar barang masuk/keluar	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
6	BN.05	Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Negara a. Surat usulan/permohonan fasilitasi b. Surat penawaran pada/dari rekanan c. SK Perjanjian Kerja d. Dokumen kontrak kerja e. Surat perintah kerja (SPK) f. Berita acara pekerjaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		g. kartu kontrol barang h. form <i>service</i> i. pengurusan surat-surat barang bergerak/kendaraan dinas j. daftar piket kebersihan dan taman k. laporan pemeliharaan/perbaikan				
7	BN.06	Pemindahtanganan a. Surat usulan penghapusan b. panitia penghapusan c. Surat persetujuan/SK d. Berita acara penghapusan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
8	BN.07	Penghapusan Barang Milik Negara a. Surat Usulan b. Surat persetujuan/SK	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
9	BN.08	Pengawasan dan Pengendalian a. Laporan pemantauan penggunaan, penertiban aset	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					KUKM	
10	BN.09	Pemantauan/Pemeriksaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
11	BN.10	Inventarisasi/Pencatatan a. Pendaftaran dan pencatatan barang milik negara b. Daftar inventaris barang	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
12	BN.11	Penilaian Barang Milik Negara	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
13	BN.12	Pelaporan Barang Milik Negara a. Laporan barang persediaan b. Berita acara rekonsiliasi internal c. Laporan tengah tahunan/semester d. Berita acara rekonsiliasi eksternal	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e. laporan tahunan f. Pelaporan barang milik negara melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi BMN			Kementerian KUKM	
N	PA	PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN				
1	PA.00	Usulan Perencanaan Program Kerja a. Usulan unit kerja beserta data pendukung b. Usulan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c. Program Kerja Tahunan Unit Kerja d. Program Kerja Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi  Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
2	PA.01	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan				
	PA.01.00	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.01.01	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PA.01.02	c. Rencana Strategis (Renstra)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
3	PA.02	Rencana Kerja				
	PA.02.00	Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM a. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah b. Rencana Kerja Tahunan c. Musrengbangnas d. Rakorbangpus	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.02.01	Penetapan / Kontrak Kinerja a. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah b. Pimpinan Unit Kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
4	PA.03	Penyusunan Rencana Anggaran				
	PA.03.00	a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Petunjuk Operasional (PO)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) Standar Biaya Khusus (SBK)			tugas dan fungsi Kementerian KUKM	
	PA.03.01	Revisi/Perubahan Dokumen Anggaran a. Revisi DIPA b. PO	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
5	PA.04	Laporan				
	PA.04.00	a. Laporan Berkala a) Laporan Harian Unit Kerja b) Laporan Mingguan Unit Kerja c) Laporan Bulanan Unit Kerja d) Laporan Triwulan Unit Kerja e) Laporan Semesteran f) Laporan Tahunan Unit Kerja g) Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan h) Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.04.01	b. Laporan Khusus a) Laporan Pemantauan Prioritas b) Laporan Pelaksanaan Kegiatan atas Permintaan Eksternal c) Laporan atas Pelaksanaan Kegiatan/ Program tertentu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PA.04.02	c. <i>Progress Report</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.04.03	d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) a) LAKIP Unit Kerja b) LAKIP Kementerian Koperasi dan UKM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.04.04	Evaluasi Program a. Evaluasi program unit kerja b. Evaluasi program Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah Monitoring dan Evaluasi Program a. Anggaran Unit Kerja b. Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
6	PA.05	Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) dan RUU APBN-P				
	PA.05.00	Penyusunan RAPBN a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas a) Dokumen Rencana Strategis atas Rencana Kerja Jangka Panjang atau Rencana Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Lima Tahunan b) Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kementerian b. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) c. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Raskip)/Standar Biaya Khusus (SBK)			kinerja Kementerian KUKM	
	PA.05.01	Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-undang APBN: a) Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan b) Lampiran Pidato c) Nota Keuangan d) RUU APBN b. Risalah rapat pembahasan anggaran kementerian KUKM RI dengan kementerian keuangan, bappenas, komisi DPR RI c. Notulen Pembahasan RUU APBN oleh Pemerintah dan DPR RI d. Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN a) Tanggapan masing-masing Fraksi b) Jawaban Pemerintah atas tanggapan Fraksi-fraksi e. Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan Pembahasan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		RUU APBN dengan Komisi VI DPR RI				
	PA.05.02	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.05.03	Keputusan Presiden tentang Rincian APBN	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.05.04	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.05.05	Usulan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RUU APBN-P)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Kementerian KUKM	
	PA.05.06	Notulen Pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.05.07	Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P: a. Tanggapan masing-masing fraksi b. Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi-fraksi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.05.08	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APBN-P)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.05.09	Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					mengganggu kinerja Kementerian KUKM	
<b>O</b>	<b>TI</b>	<b>TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>				
1	TI.00	Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi				
		a. Rencana Strategis / master plan Pembangunan Sistem	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
2	TI.01	Operasional Teknologi Informasi				
		a. Sistem informasi b. Sistem aplikasi c. Infrastruktur	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
		Perekaman dan Pemutakhiran Data a. Formulir isian b. Daftar petugas perekaman c. Jadwal pelaksanaan d. Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Migrasi Sistem Aplikasi dan Data a. Perencanaan migrasi b. Pelaksanaan migrasi c. Berita Acara kegiatan migrasi d. Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi e. Laporan hasil migrasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
3	TI.02	Pengolahan Data dan Dukungan Teknologi Informasi				
		Dokumen Hosting a. Formulir permintaan <i>hosting</i> b. Laporan hasil uji kelayakan c. Laporan pelaksanaan <i>hosting</i>  d. Layanan Back-up data digital  e. Database	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI
			Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
			Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Biro KTI

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		f. Design Informasi dan Komunikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
		g. Evaluasi Sistem dan Media	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
<b>II</b>	<b>SUBSTANTIF</b>					
<b>P</b>	<b>PK</b>	<b>PERKOPERASIAN</b>				
1	PK.00	Pengembangan dan Pembaharuan Koperasi				
	PK.00.00	Data dan Informasi Potensi Koperasi				
		a. Identifikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Verifikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasiar
	PK.00.01	Revitalisasi Pasar Rakyat a. Pengajuan Proposal  b. Verifikasi  c. Keputusan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasiar
		b. Verifikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasiar
		c. Keputusan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian	Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasiar



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
	PK.00.02	Koperasi Pengelola Factory Sharing a. Verifikasi  b. Pembinaan  c. Pendampingan  d. Monitoring	Terbatas  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasian  Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasian  Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasian  Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					kinerja Kementerian KUKM	Perkoperasiar
	PK.00.03	Korporatisasi Petani dan Nelayan				
		a. Koordinasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasiar
		b. Pendataan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasiar
		c. Pembinaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasiar
		d. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang	Asisten Deput Pengembang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<p>e. Monitoring</p> <p>f. Evaluasi</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pejabat Administrator</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM</p>	<p>dan Pembaruan Perkoperasiar</p> <p>Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasiar</p> <p>Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasiar</p>
	PK.00.04	<p>Perluasan Jaringan Usaha Koperasi</p> <p>a. Koordinasi</p>	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasiar

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Pendataan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang: dan Pembaruan Perkoperasiar
		c. Pembinaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang: dan Pembaruan Perkoperasiar
		d. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang: dan Pembaruan Perkoperasiar
		e. Monitoring	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang: dan Pembaruan Perkoperasiar

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		f. Evaluasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang dan Pembaruan Perkoperasian
2	PK.01	Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi				
	PK.01.00	Permodalan dan Penjaminan a. Pendampingan b. Rekonsiliasi Data Permodalan dan Penjaminan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi
	PK.01.01	Akses dan Skema Pembiayaan a. Sosialisasi b. Pendampingan c. Pendataan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi
	PK.01.02	Lembaga Keuangan Non Bank a. Sosialisasi b. Pendampingan c. Pendataan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Asisten Deput Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Kementerian KUKM	
	PK.01.03	Revitalisasi dan Fasilitasi a. Sosialisasi b. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi
	PK.01.04	Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi
3	PK.02	Pengawasan Koperasi				
	PK.02.00	Rencana Pengawasan Koperasi a. Rekap hasil laporan RAT b. Pembagian tugas pemeriksaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengawasan Koperasi
	PK.02.01	Pelaksanaan Pengawasan Koperasi a. Pemberitahuan dan surat tugas b. Dokumen laporan keuangan dan legalitas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Asisten Deput Pengawasan Koperasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan		Pratama	pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	
	PK.02.02	Evaluasi Hasil Pengawasan Koperasi a. Laporan Hasil Pemeriksaan b. Rapat Komite c. Berita Acara d. Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi
	PK.02.03	Akuntabilitas Koperasi a. Usulan Dokumen Perubahan Pengurus dan Pengawas b. Pendaftaran Notaris Akta Pembuat Koperasi c. Fomulir dan Usulan Sertifikat NIK	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi
	PK.02.04	Pembubaran Koperasi a. Identifikasi Koperasi Tidak Aktif dan ODS  b. Penetapan SK	Terbatas  Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi  Asisten Deputi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Pengusulan daerah Revisi Perubahan Penetapan SK	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Pengawasan Koperasi  Asisten Deput Pengawasan Koperasi
		d. Tindak Lanjut Revisi Perubahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengawasan Koperasi
		e. Pengumuman Rencana Pembubaran Koperasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengawasan Koperasi



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		f. Berita Acara Tim Penyelesai  g. Pengumuman Dalam Berita Negara	Terbatas  Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengawasan Koperasi  Asisten Deput Pengawasan Koperasi
4	PK.03	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional				
	PK.03.00	Pelatihan a. MoU dengan Lembaga Lembaga Diklat b. Pelaksanaan Diklat c. Sertifikat Pelatihan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang SDM Perkoperasian dan JF
	PK.03.01	Penanganan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) a. Draft Peraturan Menteri terkait Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi b. Draft Naskah Akademik terkait Jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deput Pengembang SDM Perkoperasian dan JF

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Fungsional Pengawas Koperasi c. Sosialisasi terkait Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi d. Bimbingan Teknis terkait Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi e. Pembentukan Tim Penanganan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi			Kementerian KUKM	
	PK.03.02	Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi a. Usulan Formasi Fungsional Pengawas Koperasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM b. Persetujuan Formasi Pengawas Koperasi untuk Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) c. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman terkait Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi d. Surat Edaran terkait Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang SDM Perkoperasiar dan JF
	PK.03.03	Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi a. Rekomendasi Fungsional Pengawas Koperasi melalui Perpindahan Jabatan b. Hasil Penilaian Seleksi Pengangkatan melalui Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi c. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman terkait Perpindahan Jabatan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi d. Surat Edaran terkait Perpindahan Jabatan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang SDM Perkoperasiar dan JF

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PK.03.05	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi a. Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi b. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi c. Sidang Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi d. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi e. Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang SDM Perkoperasian dan JF
<b>Q</b>	<b>UM</b>	<b>USAHA MIKRO</b>				
1	UM.00	Pembiayaan Usaha Mikro				
	UM.00.00	Akses dan skema pembiayaan a. Pendampingan KUR  b. SK Pendamping	Biasa/Terbuka  Terbatas	Pejabat Administrator  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pembiayaan Usaha Mikro  Asisten Deput Pembiayaan Usaha Mikro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro
		d. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro
	UM.00.01	Peningkatan Permodalan Usaha Mikro				
		a. Usulan daerah	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro
		b. Verifikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Penetapan penerimaan bantuan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro
		d. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro
		e. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro
		f. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
2	UM.01	Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro				
	UM.01.00	Perizinan Usaha a. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro
	UM.01.01	Sertifikasi Produk a Fasilitasi b Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro
	UM.01.02	Pemetaan Data Usaha Mikro a. Pendataan Usaha Mikro Daerah	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro
	UM.01.03	Bantuan Pemerintah a. Koordinasi b. Pendataan c. Penetapan d. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e Evaluasi			Kementerian KUKM	
3	UM.02	Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro				
	UM.02.00	Kemitraan a. Koordinasi  b. Perjanjian kerja sama  c. Fasilitasi  d. Pendampingan	Terbatas  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat	Asisten Deput Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro  Asisten Deput Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro  Asisten Deput Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro  Asisten Deput Pengembang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e. Monitoring	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	<p>mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM</p> <p>Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM</p>	<p>Rantai Pasok Usaha Mikro</p> <p>Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro</p>
	UM.02.01	Pemasaran / <i>E-Commerce</i> a. Koordinasi  b. Perjanjian kerja sama	Terbatas  Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro  Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Fasilitasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro
		d. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro
		e. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro
UM.02.02	Jaringan Usaha a. Koordinasi		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
		b. Perjanjian kerja sama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro
		c. Fasilitasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro
		d. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro
		e. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Kementerian KUKM	
	UM.02.03	Klister/Komoditas Usaha Mikro a. Koordinasi  b. Penyusunan Model Bisnis  c. Perjanjian kerja sama  d. Fasilitasi	Terbatas  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro  Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro  Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro  Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Usaha Mikro  Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
		f. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro
4	UM.03	Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro				
	UM.03.00	Pelatihan a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Pelatihan  c. Monitoring  d. Evaluasi	Biasa/Terbuka  Terbatas  Terbatas	Pejabat Administrator  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Kapasitas Usaha Mikro  Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro  Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro
	UM.03.01	Pendampingan a Koordinasi b Pelatihan c Monitoring d Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	UM.03.02	Pengembangan Kompetensi Usaha Mikro Standar Nasional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Rantai Pasok Usaha Mikro
5	UM.04	Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha				
	UM.04.00	Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro a. Hasil bantuan hukum b. Hasil pendampingan hukum c. Hasil konsultasi usaha mikro d. Identifikasi e. SK pelaksanaan f. Laporan hasil pelaksanaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha
	UM.04.01	Regulasi dan Kebijakan bagi Usaha Mikro a. Penyusunan regulasi kebijakan usaha mikro  b. Sosialisasi regulasi kebijakan usaha mikro	Terbatas  Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu	Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha  Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Konsultasi Usaha
<b>R</b>	<b>UK</b>	<b>USAHA KECIL MENENGAH</b>				
1	UK.00	Pembiayaan dan Investasi UKM				
	UK.00.00	Pembiayaan UKM				
		a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM
		b. Sosialisasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM
		c. Profiling Data UKM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Kurasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM
		e. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM
	UK.00.01	Investasi UKM a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM
		b. Kurasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Pendampingan a) Perpajakan b) Investasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM
		d. Konsultasi Pembiayaan dan Investasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM
		e. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM
		f. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		g. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pembiayaan dan Investasi UKM
2	UK.01	Pengembangan SDM UKM				
	UK.01.00	Peningkatan Kapasitas Pelaku UKM a. Koordinasi  b. Data Peserta  c. Kurasi	Biasa/Terbuka   Terbatas   Terbatas	Pejabat Administrator   Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama   Pejabat	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak	Asisten Deput Pengembang SDM UKM   Asisten Deput Pengembang SDM UKM   Asisten Deput

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Kampus UKM	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Pengembangar SDM UKM
		e. Workshop	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangar SDM UKM
		f. Katalog UKM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangar SDM UKM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		g. Laporan  h. Monitoring  i. Evaluasi	Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Pengembang SDM UKM  Asisten Deputi Pengembang SDM UKM  Asisten Deputi Pengembang SDM UKM
	UK.01.01	Penguatan Kapasitas Pendamping UKM a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang SDM UKM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Data Calon Peserta Online dan Offline	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembangar SDM UKM
		c. Kurasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembangar SDM UKM
		d. <i>Training</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembangar SDM UKM
		e. <i>Coaching</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deput Pengembangar SDM UKM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		f. Consulting	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembangar SDM UKM
		g. Mentoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembangar SDM UKM
		h. Uji Sertifikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembangar SDM UKM
		i. Data Pendampingan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deput Pengembangar SDM UKM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		j. Evaluasi  k. Laporan	Terbatas  Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang SDM UKM  Asisten Deput Pengembang SDM UKM
3	UK.02	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok				
	UK.02.00	Pengembangan Kawasan UKM a. Koordinasi  b. Pengumpulan usulan proposal	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat	Asisten Deput Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok  Asisten Deput Pengembang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Penetapan usulan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Kawasan dan Rantai Pasok  Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok
		d. Studi Kelayakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok
		e. Sosilaisasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok
		f. Pendampingan <i>Factory Sharing</i>	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Asisten Deput



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		g. Pembangunan fisik Factoring sharing	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok
		h. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok
		i. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		j. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok
	UK.02.01	Pengembangan Rantai Pasok UKM a. Koordinasi  b. Pengumpulan data  c. Sosialisasi	Biasa/Terbuka  Terbatas  Terbatas	Pejabat Administrator  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok  Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok  Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
		d. Pendampingan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok
		e. Sertifikasi standarisasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok
		f. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok
		g. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		h. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Kawasan dan Rantai Pasok
4	UK.03	Kemitraan Perluasan Pasar UKM				
	UK.03.00	Kemitraan UKM a. Koordinasi  b. Pengumpulan data  c. Kurasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
			Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
			Terbatas	Pejabat Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Asisten Deput Konsultasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Sosialisasi Laporan	Terbatas	Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Bisnis dan Pendampingan Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		e. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		f. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	UK.03.01	Perluasan Pasar UKM a. Koordinasi  b. Profiling Data  c. Kurasi  d. Promosi	Biasa/Terbuka  Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pejabat Administrator  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan  Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan  Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan  Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		f. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
<b>S</b>	<b>WU</b>	<b>KEWIRAUSAHAAN</b>				
1	WU.00	Konsultasi Bisnis dan Pendampingan				
	WU.00.00	Konsultasi Bisnis Pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampinga:
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampinga:
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampinga:
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampinga:



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
		f. Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
	WU.00.01	Pendampingan Usaha Pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, identifikasi wirausaha, penyusunan pedoman pendampingan wirausaha, sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya a. Koordinasi  b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
			Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		f. Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	WU.00.02	Pemasyarakatan Kewirausahaan Pemasyarakatan pendampingan usaha dan konsultasi bisnis, dan penumbuhan kewirausahaan a. Koordinasi  b. Pelaksanaan  c. Laporan  d. Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama  f. Perjanjian Kerjasama	Terbatas  Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan  Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
2	WU.01	Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha				
	WU.01.00	Pengembangan Teknologi Informasi Usaha Pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sistem informasi kewirausahaan, sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Usaha  Asisten Deput Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Asisten Deput Pengembang Teknologi Informasi dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	WU.01.01	Pengembangan Inkubasi Usaha Pengembangan, pendampingan dan pelatihan dan kewirausahaan, pengembangan lembaga inkubator lembaga pendidikan dan pelatihan, digitalisasi KUMKM, Sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya f. Perjanjian Kerjasama  a. Koordinasi  b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inkubasi Usaha  Asisten Deputi Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
		a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deputi Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Usaha  Asisten Deput Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
		f. Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan	Asisten Deput Pengembang Teknologi Informasi dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inkubasi Usaha
	WU.01.02	Pemasyarakatan Inkubasi Kewirausahaan Pemasyarakatan Inkubasi Kewirausahaan a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Monitoring dan Evaluasi  e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama  f. Perjanjian Kerjasama	Terbatas  Terbatas  Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha  Asisten Deput Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha  Asisten Deput Pengembang Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
3	WU.02	Pengembangan Ekosistem Bisnis				
	WU.02.00	Peningkatan Peran Usaha, industri dan pendidikan Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan, Pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sinkronisasi regulasi/ peraturan/ kebijakan, sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama  f. Perjanjian Kerjasama	Terbatas  Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis  Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis
	WU.02.01	Peningkatan Peran Pemerintah Pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan serta pengembangan kapasitas SDM, pengelolaan dan pemberdayaan PLUT KUMKM, sistem pemantauan dan pelaporan, sinkronisasi regulasi/ peraturan/kebijakan, sinergi kemitraan, dan tenaga pendukung lainnya a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	KUKM Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		f. Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pengembang Ekosistem Bisnis
4	WU.03	Pembiayaan Wirausaha				
	WU.03.00	Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif, Bantuan pemerintah, peningkatan akses pembiayaan dan kapasitas wirausaha, pembiayaan alternatif, literasi keuangan, digitalisasi keuangan dan tenaga pendukung lainnya a. Koordinasi  b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Depu Pembiayaan Wirausaha
			Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Depu Pembiayaan Wirausaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pembiayaan Wirausaha
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pembiayaan Wirausaha
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Depu Pembiayaan Wirausaha
		f. Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan	Asisten Depu Pembiayaan Wirausaha



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Monitoring dan Evaluasi  e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama  f. Perjanjian Kerjasama	Terbatas  Terbatas  Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pembiayaan Wirausaha  Asisten Deput Pembiayaan Wirausaha  Asisten Deput Pembiayaan Wirausaha
5	WU.04	Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha				
	WU.04.00	Pemetaan Data Pengembangan, pendampingan dan pelatihan dan kewirausahaan, pemetaan dan pendataan KUMKM, tenaga pendukung lainnya				



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama  f. Perjanjian Kerjasama	Terbatas  Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha  Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
	WU.04.01	Analisis dan Pengkajian Usaha Pengembangan, pendampingan dan pelatihan tenaga kewirausahaan, Analisis dan Pengkajian Usaha, dan pendukung lainnya a. Koordinasi  b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat	Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha  Asisten Deput Pemetaan dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM  Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Data, Analisis Pengkajian Usaha  Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		f. Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
	WU.04.02	Data Makro Ekonomi Bidang KUMKM Data makro ekonomi KUMKM, pengembangan, tenaga pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, dan pendukung lainnya a. Koordinasi  b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
			Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deput Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha

<b>NO</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS DOKUMEN/ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
		f. Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha

MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK  
INDONESIA,



TETEN MASDUKI

KEMENKOP-UKM

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
 KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES  
 ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tabel Pengamanan Penyimpanan Arsip Dinamis Sesuai Dengan Tingkat Klasifikasi Keamanan

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL					
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
1.	Biasa/ Terbuka	Tidak ada persyaratan Prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus
2.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk <i>database</i> ) harus dilindungi	1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital) 2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual	1. Autentikasi server 2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL					
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
					terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal		khusus 3. Firewall dan sistem-sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi
3.	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip</li> <li>2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia</li> </ol>	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses yang terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip</li> <li>2. File-file elektronik (termasuk <i>database</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hanya staf yang ditunjuk oleh kementerian atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut</li> <li>4. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital)</li> <li>5. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus</li> <li>5. Firewall serta sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi. Firewall adalah sistem</li> </ol>



NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana			
							untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita

KEMENKOP-UKM

Tabel Pengamanan Penyampaian Informasi Arsip Dinamis Dengan Tingkat Klasifikasi Keamanan

NO.	TINGKAT/DRAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1.	Biasa/Terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus.	Tidak ada prosedur khusus.
2.	Terbatas	Amplop segel.	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, password, dan lain-lain.
3.	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menggunakan warna kertas yang berbeda</li><li>2. Diberi kode rahasia</li><li>3. Menggunakan amplop dobel</li><li>4. Amplop segel, stempel rahasia.</li><li>5. Konfirmasi tanda terima.</li><li>6. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email.</li><li>2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia.</li><li>3. Menggunakan persandian atau kriptografi</li></ol>

MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK  
INDONESIA,

  
TETEN MASDUKI